

RINGKASAN

Penelitian ini menggambarkan kurangnya komitmen politik pada masing-masing aktor yang terlibat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan limbah industri tahu dengan teknologi IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah. Akibatnya, terjadi hambatan politis seperti kurangnya kepemimpinan lingkungan dari salah satu aktor terkait untuk menekan berbagai macam kepentingan lain selain kepentingan perbaikan lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan, peran aktor berkepentingan, serta faktor penghambat dan pendorong dalam proses perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui pengadaan IPAL di Kalisari.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Data yang diperoleh hasil dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hambatan politis di tingkat pusat, daerah, dan desa. Pada tingkat pusat terjadi kegagalan dalam perumusan kebijakan yang mencakup khusus pengelolaan limbah di Desa Kalisari. Selain itu, pemerintah pusat melalui BPPT dan Kemenristek juga belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai penyeimbang kepentingan. Pada tingkat daerah, terjadi kegagalan implementasi kebijakan, seperti kurangnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan kurangnya kepedulian pada aspek keberlanjutan, serta masih berorientasi pada kepentingan ekonomi semata. Pada tingkat desa, walaupun Pemerintah Desa Kalisari menjadi mediator yang baik bagi pemerintah pusat dan masyarakat, terjadi juga krisis kepemimpinan lingkungan yang membuat munculnya konflik antar Kelompok Swadaya Masyarakat yang bertugas mengelola IPAL secara teknis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepentingan perbaikan lingkungan hidup sebagai orientasi utama dalam menjalankan kebijakan pengadaan IPAL di Desa Kalisari. Dalam pengelolaan IPAL yang mengutamakan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kerangka *collaborative governance* idealnya masing-masing aktor menempatkan paradigma perbaikan lingkungan hidup sebagai pedoman utama dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan.

Kata Kunci: Politik Lingkungan, Limbah Industri Tahu, *Collaborative Governance*.

SUMMARY

Waste management of tofu industry through the IPAL in Kalisari, experiencing the various political obstacles, although the program was in the national pilot project as self-powered villages and involve some important actors. Political obstacles are the lacks environmental leadership from one of the actors to suppress various other interests than the interests of the environment improvement. The purpose of this research is to describe the management, the role of the actors, resistance factors and motivation in the process of the improvement of the environmental quality through the IPAL in Kalisari.

This research method using descriptive qualitative method. The type of research that is used is the case study. The data obtained from the results of observation, interview and examine the documentation. Then, the data will be analyzed using the analysis of the Miles and Huberman interactive model. To ensure the validity of data, this research will use the technique of triangulation data.

Political obstacles occurred at the national level, provincial level, and village government level. At the national level, failure occurred in the formulation of policies that include waste management in the village of Kalisari. In addition, the national government (BPPT and Kemenristek) also has not yet been able to balance the interests of a variety of stakeholder groups. At the provincial level, there was an implementation policy failure, such as the lacks implementation of the functions of supervision, a lacks awareness of sustainability aspects, and still oriented on economic interests. At the grassroots level, Kalisari Village Government is a good mediator for the national government and the village community, but there is a crisis of environmental leadership that cause conflicts between KSM Biolita.

This research shows that still lacks the ecological paradigm as the main orientation in running the IPAL procurement policy in the village of Kalisari. In the management of the IPAL which requires the participation of the community is high, and in the framework of collaborative governance. Ideally, each of the actors put the ecological paradigm as the main guidelines in implementing the policies that have been formulated.

Keywords: Political Ecology, Industrial Waste Management, Collaborative Governance.